

HAND OUT
MATA KULIAH LANDASAN PENDIDIKAN



Oleh,
Drs. Edi Rohendi, M.Pd
Dra. Titing Rohayati, M.Pd
Dr. Jenuri, S.Ag., M.Pd

PROGRAM S1 PGSD
KAMPUS CIBIRU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2012-2013

Hand Out Perkuliahan

Nama Mata Kuliah	: Landasan Pendidikan
Semester/Program	: II/S1 PGSD
Pertemuan ke	: 2
Pokok Bahasan	: Konsep Landasan Pendidikan

A. Pengertian Landasan Pendidikan

Landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Baik dalam momen studi pendidikan maupun dalam momen praktek pendidikan.

B. Jenis-Jenis Landasan Pendidikan

1. Landasan religius pendidikan
Landasan religius pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan.
2. Landasan filosofis pendidikan
Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan.
3. Landasan ilmiah pendidikan
Landasan ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Dengan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, antropologi, atau sejarah.
 - a) Landasan psikologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah psikologi yang menjadi titik tolak dalam pendidikan.
 - b) Landasan sosiologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang menjadi titik tolak dalam pendidikan.
 - c) Landasan antropologi pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah antropologi yang menjadi titik tolak dalam pendidikan.
 - d) Landasan ekonomi pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah ekonomi yang menjadi titik tolak dalam pendidikan.
 - e) Landasan biologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah biologi yang menjadi titik tolak dalam pendidikan.
 - f) Landasan politik pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah politik yang menjadi titik tolak dalam pendidikan.
 - g) Landasan historis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari konsep dan praktek pendidikan masa lampau (sejarah) yang menjadi titik tolak perkembangan pendidikan masa kini dan masa datang.
 - h) Landasan fisiologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah fisiologi tentang manusia yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan.
 - i) Landasan hukum/yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan.

Berdasarkan sifat ini asumsi-asumsinya Landasan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua jenis :

- 1) Landasan deskriptif pendidikan : asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia sebagai sasaran pendidikan apa adanya (*Dasein*) yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan.
Yang meliputi : landasan psikologi pendidikan, landasan biologi pendidikan, landasan sosiologi pendidikan, landasan antropologi pendidikan.
- 2) Landasan preskriptif pendidikan : asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia yang ideal / diharapkan / dicita-citakan (*Das Sollen*) yang disarankan menjadi titik tolak studi pendidikan dan atau praktek pendidikan.
Yang meliputi : landasan filosofis pendidikan, landasan religius pendidikan, dan landasan yuridis pendidikan.

C. Fungsi Landasan Pendidikan

Landasan pendidikan berfungsi : sebagai titik tolak dan tumpuan bagi para guru dalam melaksanakan praktek pendidikan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A.R.S.,(1991), *Educational Theory, A Quranic Outlook* (Alih bahasa: Mutammam), CV Diponegoro, Bandung.
- Adler, Mortimer, J., (1982), *The Paideia Proposal An Educational Manifesto*, Macmillan Publishing Company, New York.
- Buber, M., (1959), *Between Man and Man*, (Translated by Ronald Gregor Smith), Beacon Press, Boston.
- Butler, J. D., (1957), *Four Philosophies and Their Practice in Education and Religion*, Harper & Brothers Publishers, New York.
- Cassirer, E., (1987), *An Essay On Man*. (Terj.: Alois A. Nugroho), Gramedia, Jakarta, 1987.
- Friedman, S. M., (1954), *Martin Buber, The. Life of Dialogue*, Routledge and Began Paul Ltd., London.
- Frost Jr., S.E., (1957), *Basic Teaching of.The. Great Philosophers*, Barnes & Nobles, New York.
- Hasan, F., (1973), *Berkenalan dengan Eksistensialisme*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Henderson, S. v. P., (1959), *Introduction to Philosophy of Education*, The University of Chicago Press, Chicago.
- Huijbers, T., (1987), *Manusia Merenungkan Dunianya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- Langeveld, M.J., (1980), *Beknopte Theoretische Paedagogiek*, (Terj.:Simajuntak), Jemmars, Bandung.
- Matsushita, Konosuke, (1982), *Thoughts of Man*, (terj. HB Yassin), Pustaka Jaya, Jakarta.
- Muchtar, O., (1976), *Pendidikan Nasional Indonesia, Pengertian dan Sejarah Perkembangan*, Balai penelitian, IKIP Bandung.
- Muchtar, O. (Penyunting), (1991), *Dasar-Dasar Kependidikan*, IKIP Bandung.
- Mudyahardjo, R. (1995), *Filsafat Pendidikan (Sebuah Studi Akademik) Bagian I Orientasi Umum: Landasan Filosofis Pendidikan dan Filsafat Pendidikan sebagai Suatu teori Pendidikan*, Jurusan Filsafat Dan sosiologi Pendidikan, FIP, IKIP Bandung.

- Mudyahardjo, R., (2001), Filsafat Ilmu Pendidikan: Suatu Pengantar, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung.
- Othman, A.I., (1987), The Concept of Man in Islam in The Writings of Al-Ghazali, (Terj.: Johan Smit, Anas Mahyudin, Yusuf), Pustaka, Bandung.
- Plato, (1986), Phaidon: Dialog Sokrates tentang Tubuh-Jiwa, Sinar Baru, Bandung.
- Poespowardojo, S. dan Bertens, K., (1983), Sekitar Manusia.: Bunga Rampai tentang Filsafat Manusia, Gramedia, Jakarta.
- Soelaeman, M.I., (1988), Suatu, Telaah tentang Manusia-Religi.Pendidikan, Depdikbud.
- Syam, M. N., (1984), Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia.
- Syaiyidain, K.G., (1954), Iqbal's Educational Philosophy, Shaik Muhammad Ashraf, Kasmiri Bazar, Lahore.
- Schumacher, E.F., (1980), A Guide for The Perflexed, Sphere Books Ltd., London.
- Syaripudin, T., (1994), Implikasi Eksistensi Manusia terhadap Konsep Pendidikan Umum (Thesis), Program Pascasarjana IKIP Bandung.
- Titus, Harold, et all., (1959), Living Issues in Philosophy, American Book Coy., New York
- Van Peursen, C.A., (1982). Tubuh-Jiwa-Roh., (Terj.: K. Bertens), BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Van der Weij, P.A., (1988), Filsuf-Filsuf Besar tentang. Manusia (Terj.: K. Bertens), Gramedia, Jakarta.

Hand Out Perkuliahan

Nama Mata Kuliah	: Landasan Pendidikan
Semester/Program	: II/S1 PGSD
Pertemuan ke	: 3
Pokok Bahasan	: Hakikat Manusia dan Pendidikan

A. Hakikat Manusia

1. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
2. Manusia sebagai kesatuan badan dan ruh
3. Individualitas / personalitas
4. Sosialitas
5. Keberbudayaan
6. Moralitas
7. Keberagamaan
8. Historitas
9. Eksistensi manusia adalah untuk menjadi manusia

B. Keharusan Pendidikan : Manusia sebagai Makhluk yang Perlu Dididik dan Perlu Mendidik Diri

Eksistensi manusia terpaut dengan masa lalunya sekaligus mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian, manusia berada dalam perjalanan hidup, dalam perkembangan dan pengembangan diri. Ia adalah manusia tetapi sekaligus “belum selesai” mewujudkan dirinya sebagai manusia (prinsip historisitas).

Bersamaan dengan hal di atas, dalam eksistensinya manusia mengemban tugas untuk menjadi manusia ideal. Sosok manusia ideal merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan atau yang seharusnya. Sebab itu, sosok manusia ideal tersebut belum terwujud melainkan harus diupayakan untuk diwujudkan (prinsip idealitas).

Manusia memang telah dibekali berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia, misalnya: potensi untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, potensi untuk dapat berbuat baik, potensi cipta, rasa, karsa, dsb. Namun demikian setelah kelahirannya, bahwa potensi itu mungkin terwujud, kurang terwujud atau tidak terwujud. Manusia mungkin berkembang sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya (menjadi manusia), sebaliknya mungkin pula ia berkembang ke arah yang kurang atau tidak sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaannya.

Kemampuan yang seharusnya dilakukan manusia tidak di bawa sejak kelahirannya, melainkan harus diperoleh setelah kelahirannya dalam perkembangan menuju kedewasaannya. Di satu pihak, berbagai kemampuan tersebut diperoleh manusia melalui upaya bantuan dari pihak lain. Di lain pihak, manusia yang bersangkutan juga harus belajar atau harus mendidik diri. Mengapa manusia harus mendidik diri? Sebab, dalam bereksistensi yang harus menga-ada-kan/menjadikan diri itu hakikatnya adalah manusia itu sendiri. Sebaik dan sekuat apa pun upaya yang diberikan pihak lain (pendidik) kepada seseorang (peserta didik) untuk membantunya menjadi manusia, tetapi apabila seseorang

tersebut tidak mau mendidik diri, maka upaya bantuan tersebut tidak akan memberikan kontribusi seseorang tadi untuk menjadi manusia.

Yang menjadi asumsi perlunya manusia mendapatkan pendidikan dan perlu mendidik diri, yaitu :

- (1) prinsip historisitas,
- (2) Prinsip idealitas, dan
- (3) prinsip posibilitas/aktualitas.

C. Kemungkinan Pendidikan : Manusia sebagai makhluk yang Dapat Dididik

Lima prinsip antropologis yang melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik, yaitu :

1. Prinsip potensialitas
2. Prinsip dinamika
3. Prinsip Individualitas
4. Prinsip sosialitas
5. Prinsip Moralitas

Daftar Pustaka

- Abdullah, A.R.S.,(1991), *Educational Theory, A Quranic Outlook* (Alih bahasa: Mutammam), CV Diponegoro, Bandung.
- Adler, Mortimer, J., (1982), *The Paideia Proposal An Educational Manifesto*, Macmillan Publishing Company, New York.
- Buber, M., (1959), *Between Man and Man*, (Translated by Ronald Gregor Smith), Beacon Press, Boston.
- Butler, J. D., (1957), *Four Philosophies and Their Practice in Education and Religion*, Harper & Brothers Publishers, New York.
- Cassirer, E., (1987), *An Essay On Man*. (Terj.: Alois A. Nugroho), Gramedia, Jakarta, 1987.
- Friedman, S. M., (1954), *Martin Buber, The. Life of Dialogue*, Routledge and Began Paul Ltd., London.
- Frost Jr., S.E., (1957), *Basic Teaching of The. Great Philosophers*, Barnes & Nobles, New York.
- Hasan, F., (1973), *Berkenalan dengan Eksistensialisme*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Henderson, S. v. P., (1959), *Introduction to Philosophy of Education*, The University of Chicago Press, Chicago.
- Huijbers, T., (1987), *Manusia Merenungkan Dunianya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- Langeveld, M.J., (1980), *Beknopte Theoretische Paedagogiek*, (Terj.:Simajuntak), Jemmars, Bandung.
- Matsushita, Konosuke, (1982), *Thoughts of Man*, (terj. HB Yassin), Pustaka Jaya, Jakarta.
- Muchtar, O., (1976), *Pendidikan Nasional Indonesia, Pengertian dan Sejarah Perkembangannya*, Balai penelitian, IKIP Bandung.
- Muchtar, O, (Penyunting), (1991), *Dasar-Dasar Kependidikan*, IKIP Bandung.
- Mudyahardjo, R. (1995), *Filsafat Pendidikan (Sebuah Studi Akademik) Bagian I Orientasi Umum: Landasan Filosofis Pendidikan dan Filsafat Pendidikan sebagai Suatu teori Pendidikan*, Jurusan Filsafat Dan sosiologi Pendidikan, FIP, IKIP Bandung.

- Mudyahardjo, R., (2001), *Filsafat Ilmu Pendidikan: Suatu Pengantar*, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung.
- Othman, A.I., (1987), *The Concept of Man in Islam in The Writings of Al-Ghazali*, (Terj.: Johan Smit, Anas Mahyudin, Yusuf), Pustaka, Bandung.
- Plato, (1986), *Phaidon: Dialog Sokrates tentang Tubuh-Jiwa*, Sinar Baru, Bandung.
- Poespowardojo, S. dan Bertens, K., (1983), *Sekitar Manusia.: Bunga Rampai tentang Filsafat Manusia*, Gramedia, Jakarta.
- Soelaeman, M.I., (1988), *Suatu, Telaah tentang Manusia-Religi.Pendidikan*, Depdikbud.
- Syam, M. N., (1984), *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila, Usaha Nasional*, Surabaya-Indonesia.
- Syaiyidain, K.G., (1954), *Iqbal's Educational Philosophy*, Shaik Muhammad Ashraf, Kasmiri Bazar, Lahore.
- Schumacher, E.F., (1980), *A Guide for The Perflexed*, Sphere Books Ltd., London.
- Syaripudin, T., (1994), *Implikasi Eksistensi Manusia terhadap Konsep Pendidikan Umum (Thesis)*, Program Pascasarjana IKIP Bandung.
- Titus, Harold, et all., (1959), *Living Issues in Philosophy*, American Book Coy., New York
- Van Peursen, C.A., (1982). *Tubuh-Jiwa-Roh.*, (Terj.: K. Bertens), BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Van der Weij, P.A., (1988), *Filsuf-Filsuf Besar tentang. Manusia* (Terj.: K. Bertens), Gramedia, Jakarta.

Hand Out Perkuliahan

Nama Mata Kuliah	: Landasan Pendidikan
Semester/Program	: II/S1 PGSD
Pertemuan ke	: 4
Pokok Bahasan	: Pengertian Pendidikan

A. Pengertian Pendidikan berdasarkan lingkupnya

1. Pendidikan dalam arti luas

Pendidikan adalah hidup artinya pendidikan adalah segala pengalaman (belajar) di berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi perkembangan individu.

2. Pendidikan dalam arti sempit

Dalam arti sempit pendidikan hanya berlangsung bagi mereka yang menjadi siswa pada suatu sekolah atau mahasiswa pada suatu perguruan tinggi (lembaga pendidikan formal). Pendidikan dilakukan dalam bentuk pengajaran (*instruction*) yang terprogram dan bersifat formal. Pendidikan berlangsung di sekolah atau di dalam lingkungan tertentu yang diciptakan secara sengaja dalam konteks kurikulum sekolah yang bersangkutan.

B. Pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah dan pendekatan sistem

1. Pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah

- Berdasarkan pendekatan sosiologi, pendidikan dipandang identik dengan sosialisasi, yaitu suatu proses membantu generasi mendatang mampu menjadi anggota masyarakat yang diharapkan.
- Berdasarkan pendekatan antropologi
- Berdasarkan pendekatan ekonomi
- Berdasarkan pendekatan biologi
- Berdasarkan tinjauan pedagogik

2. Pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem

Berdasarkan pendekatan sistem, pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan secara fungsional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan (mentransformasi input menjadi out put).

Adapun komponen sistem pendidikan tersebut meliputi :

- 1) Tujuan dan prioritas
- 2) Siswa atau peserta didik
- 3) Pengelolaan atau management
- 4) Struktur dan jadwal
- 5) Isi atau kurikulum
- 6) Guru atau pendidik
- 7) Alat bantu belajar

- 8) Fasilitas
- 9) Teknologi
- 10) Kontrol kualitas
- 11) Penelitian
- 12) Biaya

C. Pendidikan sebagai humanisasi

Manusia adalah makhluk yang perlu dididik dan sebagai makhluk yang dapat dididik. Di pihak lain anda telah pahami bahwa eksistensi manusia adalah untuk menjadi manusia. Inilah keharusannya, sebagaimana dinyatakan Karl Jaspers bahwa : “*to be a man is to become a man*” / ada sebagai manusia adalah menjadi manusia (Fuad Hasan, 1973). Adapun manusia akan dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Implikasinya maka pendidikan tiada lain adalah humanisasi (upaya memanusaiakan manusia).

Daftar Pustaka

- Abdullah, A.R.S.,(1991), *Educational Theory, A Quranic Outlook* (Alih bahasa: Mutammam), CV Diponegoro, Bandung.
- Adler, Mortimer, J., (1982), *The Paideia Proposal An Educational Manifesto*, Macmillan Publishing Company, New York.
- Buber, M., (1959), *Between Man and Man*, (Translated by Ronald Gregor Smith), Beacon Press, Boston.
- Butler, J. D., (1957), *Four Philosophies and Their Practice in Education and Religion*, Harper & Brothers Publishers, New York.
- Cassirer, E., (1987), *An Essay On Man*. (Terj.: Alois A. Nugroho), Gramedia, Jakarta, 1987.
- Friedman, S. M., (1954), *Martin Buber, The. Life of Dialogue*, Routledge and Began Paul Ltd., London.
- Frost Jr., S.E., (1957), *Basic Teaching of.The. Great Philosophers*, Barnes & Nobles, New York.
- Hasan, F., (1973), *Berkenalan dengan Eksistensialisme*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Henderson, S. v. P., (1959), *Introduction to Philosophy of Education*, The University of Chicago Press, Chicago.
- Huijbers, T., (1987), *Manusia Merenungkan Dunianya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- Langeveld, M.J., (1980), *Beknopte Theoritische Paedagogiek*, (Terj.:Simajuntak), Jemmars, Bandung.
- Matsushita, Konosuke, (1982), *Thoughts of Man*, (terj. HB Yassin), Pustaka Jaya, Jakarta.
- Muchtar, O., (1976), *Pendidikan Nasional Indonesia, Pengertian dan Sejarah Perkembangan*, Balai penelitian, IKIP Bandung.
- Muchtar, O, (Penyunting), (1991), *Dasar-Dasar Kependidikan*, IKIP Bandung.
- Mudyahardjo, R. (1995), *Filsafat Pendidikan (Sebuah Studi Akademik) Bagian I Orientasi Umum: Landasan Filosofis Pendidikan dan Filsafat Pendidikan sebagai Suatu teori Pendidikan*, Jurusan Filsafat Dan sosiologi Pendidikan, FIP, IKIP Bandung.
- Mudyahardjo, R., (2001), *Filsafat Ilmu Pendidikan: Suatu Pengantar*, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung.
- Othman, A.I., (1987), *The Concept of Man in Islam in The Writings of Al-Ghazali*, (Terj.: Johan Smit, Anas Mahyudin, Yusuf), Pustaka, Bandung.

- Plato, (1986), Phaidon: Dialog Sokrates tentang Tubuh-Jiwa, Sinar Baru, Bandung.
- Poespowardojo, S. dan Bertens, K., (1983), Sekitar Manusia.: Bunga Rampai tentang Filsafat Manusia, Gramedia, Jakarta.
- Soelaeman, M.I., (1988), Suatu, Telaah tentang Manusia-Religi.Pendidikan, Depdikbud.
- Syam, M. N., (1984), Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia.
- Syaiyidain, K.G., (1954), Iqbal's Educational Philosophy, Shaik Muhammad Ashraf, Kasmiri Bazar, Lahore.
- Schumacher, E.F., (1980), A Guide for The Perflexed, Sphere Books Ltd., London.
- Syaripudin, T., (1994), Implikasi Eksistensi Manusia terhadap Konsep Pendidikan Umum (Thesis), Program Pascasarjana IKIP Bandung.
- Titus, Harold, et all., (1959), Living Issues in Philosophy, American Book Coy., New York
- Van Peursen, C.A., (1982). Tubuh-Jiwa-Roh., (Terj.: K. Bertens), BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Van der Weij, P.A., (1988), Filsuf-Filsuf Besar tentang. Manusia (Terj.: K. Bertens), Gramedia, Jakarta.

Hand Out Perkuliahan

Nama Mata Kuliah	: Landasan Pendidikan
Semester/Program	: II/S1 PGSD
Pertemuan ke	: 5
Pokok Bahasan	: Pendidikan sebagai ilmu dan seni

A. Alasan pentingnya status keilmuan pendidikan

Suatu disiplin ilmu yang di dipandang sebagai pengetahuan ilmiah apabila disiplin ilmu tersebut memiliki status keilmuan yang jelas. Demikian pula pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari gejala-gejala pendidikan baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis perlu mempunyai status keilmuan yang jelas. Kejelasan status keilmuan pendidikan akan memperkuat eksistensinya manakala diuji menurut kaidah-kaidah pengetahuan ilmiah sehingga dapat mempertahankan eksistensi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan.

B. Konsep pengetahuan dan ilmu pengetahuan

1. Konsep pengetahuan

Pengetahuan diartikan sebagai segala sesuatu yang kita kenal atau kita ketahui mengenai suatu hal atau objek yang diperoleh dari pengalaman dalam kehidupan sehari-hari baik bersumber dari pengalaman kita sendiri dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan keseharian, dari informasi atau cerita orang lain, dari kebiasaan atau adat istiadat, atau dari ajaran agama, filsafat, sejarah dan sebagainya.

Jenis-jenis pengetahuan :

- Pengetahuan biasa atau awam (Common sense knowledge)
- Pengetahuan ilmiah (scientific knowledge atau sains)
- Pengetahuan filsafat (philosophical knowledge atau riseout filsafat)
- Pengetahuan religi (pengetahuan agama)

2. Pengetahuan ilmiah / ilmu pengetahuan,

yaitu : seperangkat pengetahuan yang tersusun secara sistematis mengenai fenomena, termasuk cara menyusun dan memperluas dan cara mengujinya menurut kriteria yang objektif dan diakui masyarakat ilmuwan. Ilmu mempunyai dua arti :

- Sebagai sesuatu pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun serta bersistem menurut metode-metode tertentu, yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut (ilmu hukum, ilmu pendidikan, dan sebagainya)
- Segala pengetahuan dan kepandaian tentang soal duniawi akhirat lahir, batin.

C. Karakteristik dan kriteria ilmu pengetahuan

Suatu disiplin ilmu termasuk juga disiplin ilmu pendidikan perlu memiliki karakteristik dan kriteria yang jelas dalam hal landasan, objek studi, metode, fungsi dan isi / substansinya.

D. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan

Ilmu pendidikan adalah seperangkat pengetahuan, pendapat atau pandangan mengenai fenomena / gejala pendidikan yang disusun secara matematis sebagai hasil pemikiran kritis dengan menggunakan metode riset tertentu

E. Mendidik sebagai seni dan teknik

Pendidikan memerlukan prinsip-prinsip (termasuk prinsip-prinsip belajar dan prinsip-prinsip mengajar dan didaktik). Disamping perlunya konsep atau penilaian dan pertimbangan yang tepat tentang anak dan situasi serta kondisi pendidikan, dan masih diperlukan kemajuan lebih banyak di bidang penelitian perbuatan mendidik dan mengajar untuk membuktikan bahwa pada prinsipnya pendidikan memang dapat dianalisis dan seni didik dapat dipelajari secara ilmiah.

Daftar Pustaka

- Barnadib, Imam (1975). *Sistem-sistem filsafat pendidikan*. Yogyakarta: yayasan Penerbitan FIP IKIP
- Depdikbud RI. (1987). *Dasar-dasar Kependidikan*. Bandung : IKIP Bandung
- Depdiknas RI (2003). *Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Agama RI (1974). *Al-Quran dan terjemahnya*. Jakarta : Depag
- Dewwy, John. (1964). *Democracy and Education*. New York : The Mc. Miullan Company.

Hand Out Perkuliahan

Nama Mata Kuliah	: Landasan Pendidikan
Semester/Program	: II/S1 PGSD
Pertemuan ke	: 6
Pokok Bahasan	: Landasan filosofis pendidikan idealisme dan pragmatisme, dan konstruktivisme dan scholatisisme

Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi tentang pendidikan yang dideduksi dari filsafat umum yang dianut seseorang.

A. Landasan Filosofis pendidikan idealisme

Idealisme : hakikat realitas bersifat kejiwaan/spiritual/rohaniah/ideal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir, intuisi, atau mengingat kembali. Kebenaran pengetahuan diuji melalui koherensi/konsistensi ide-idenya. Adapun hakikat nilai diturunkan dari realitas absolute (Tuhan). dari realitas absolute (Tuhan). Implikasinya: pendidikan hendaknya bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, dan kebajikan sosial para siswa, agar mereka dapat melaksanakan kehidupan yang baik di dalam masyarakat/negara sesuai nilai-nilai yang diturunkan dari Yang Absolut. Untuk itu kurikulum berisikan pendidikan liberal dan pendidikan vokasional/praktis; kurikulum harus memuat pengetahuan dan nilai-nilai esensial kebudayaan; sebab itu kurikulum pendidikan cenderung sama untuk semua siswa. Kurikulum Idealisme bersifat subject matter centered. Metode dialektik diutamakan, namun demikian beberapa metode yang efektif yang mendorong belajar dapat diterima; kecenderungannya mengabaikan dasar-dasar fisiologis dalam belajar”. Guru harus unggul dalam hal intelektual maupun moral; bekerjasama dengan alam dalam proses pengembangan manusia; dan bertanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan bagi para siswa. Adapun siswa berperan bebas mengembangkan kepribadian dan bakat-bakatnya.

B. Landasan Filosofis pendidikan Realisme

Realisme: Hakikat realitas bersifat fisik/material dan objektif; keberadaan dan perkembangan realitas diatur dan diorganisasikan oleh hukum alam. Manusia adalah bagian dan dihasilkan dari alam itu sendiri; hakikat pribadi ditentukan dari apa yang dapat dikerjakannya; manusia mampu berpikir tetapi ia dapat bebas atau tidak bebas. Pengetahuan diperoleh manusia melalui pengalaman pendriaan; kebenaran pengetahuan diuji melalui korespondensinya dengan fakta. Nilai hakikatnya diturunkan dari hukum alam dan konvensi/kebiasaan serta adat istiadat masyarakat. Implikasinya: pendidikan bertujuan agar siswa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan mampu melaksanakan tanggungjawab sosial. Kurikulum pendidikan berpusat kepada isi mata pelajaran; adapun mata pelajarannya terdiri atas sains/ IPA, matematika, ilmu kemanusiaan dan IPS, serta nilai-nilai. Kurikulum tersebut harus memuat pengetahuan dan nilai-nilai esensial kebudayaan yang diberlakukan sama untuk semua siswa.

Kurikulum direncanakan dan ditentukan oleh guru. Kurikulum Realisme bersifat subject matter centered. Metode mengajar yang utama adalah pembiasaan; para siswa hendaknya belajar melalui pengalaman langsung ataupun pengalaman tidak langsung. Peranan guru cenderung bersifat otoriter; guru harus menguasai pengetahuan dan keterampilan teknik-teknik mengajar; Guru memiliki kewenangan dalam membentuk prestasi siswa. Adapun siswa berperan untuk menguasai pengetahuan, harus taat pada aturan dan disiplin.

Realisme dan Idealisme memiliki kesamaan dalam orientasi pendidikannya, yaitu Essensialisme. Namun demikian karena kedua aliran ini memiliki gagasan yang berbeda mengenai filsafat umumnya, maka kedua aliran ini tetap memiliki perbedaan pula dalam hal tujuan pendidikan, isi kurikulumnya, metode pendidikan, serta peranan pendidik dan peranan peserta didik/siswanya.

C. Landasan Filosofis pendidikan pragmatisme

Pragmatisme: Realitas hakikatnya adalah sebagaimana dialami manusia; bersifat plural, dan terus menerus berubah. Manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis dan sosial. Pengetahuan diperoleh manusia melalui pengalaman (metode sains), pengetahuan landasan Filosofis Pendidikan bersifat relatif; teori uji kebenaran pengetahuan dikenal sebagai pragmatisme/instrumentalisme, sebab pengetahuan dikatakan benar apabila dapat diaplikasikan. Hakikat nilai berada dalam proses, yaitu dalam perbuatan manusia, bersifat kondisional, relatif, dan memiliki kualitas individual dan sosial.

Pendidikan bertujuan agar siswa dapat memecahkan permasalahan hidup individual maupun sosial. Tidak ada tujuan akhir pendidikan. Kurikulum pendidika hendaknya berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa (child centered) dan berpusat pada aktifitas siswa (activity centered). Adapun kurikulum tersebut mungkin berubah. Pragmatisme mengutamakan metode pemecahan masalah (problem solving method) serta metode penyelidikan dan penemuan (inquiry and discovery method). Guru hendaknya berperan sebagai fasilitator, yaitu memimpin dan membimbing siswa belajar tanpa ikut campur terlalu jauh atas minat dan kebutuhan siswa. Adapun siswa berperan bebas untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Orientasi pendidikan Pragmatisme adalah Progresivisme dan atau Rekonstruksionisme.

D. Landasan Filosofis pendidikan scholastisisme

Realitas adalah ciptaan Tuhan. Dalam hal ini Scholastisisme menganut teori hyllemorphe dan prinsip essentia-eksistentia. Terdapat realitas fana dan realitas abadi di akhirat. Sejalan dengan konsep di atas, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, manusia adalah kesatuan badan-jiwa. Manusia diakui sebaga makhluk: alamiah, berpikir, bermasyarakat, dan sebagai makhluk spiritual. Hakikat pengetahuan : pengetahuan dapat diperoleh manusia melalui keimanan, rasio melalui berpikir, dan intuisi. Namun demikian kebenaran absolut diperoleh melalui keimanan; prinsip tersebut tersurat dalam pernyataan "*I believe in order that I may know*". Hakikat nilai : Tuhan adalah sumber kebajikan terakhir, dan Tuhan adalah tujuan akhir manusia. Sebab itu manusia harus lulus dari ujian kebajikan dengan penuh tanggung jawab moral atas dirinya sendiri,

bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dan terhadap Tuhan. Bagi penganut scholastisisme kebenaran dan nilai-nilai bersifat pasti, universal, menetap, atau abadi.

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara penuh, meliputi potensi intelektual, fisik, volisional, dan vokasionalnya agar manusia mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Isi kurikulumnya meliputi agama dan humanities. Matematika, retorika, logika, dan bahasa juga dipandang penting. Kurikulumnya meliputi pendidikan liberal yang mencakup mata pelajaran-pelajaran fundamental berkenaan dengan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan intelektual. Adapun mata pelajaran instrumental/praktis untuk kehidupan diberikan pula bagi orang-orang tertentu. Metode pendidikan yang diutamakan adalah metode mendisiplinkan pikiran (*Disciplining the mind*); latihan formal (*formal drill*); persiapan jiwa, dan Catekhisme. Dalam pendidikan guru harus menjadi teladan bagi para siswanya. Guru mempunyai wewenang untuk mengatur kelas dan merancang struktur pelajaran untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan berpikir, dan agar siswa mampu berbuat kebajikan. Adapun orientasi pendidikan scholastisisme adalah Perennialisme.

Daftar Pustaka

- Amien, A. M., (2005), *Pendidikan dari Perspektif Sains Baru: Belajar Merajut realitas*, Lembaga Penerbitan Unhas.
- Callahan J. F., Clark, L.H., (1983), *Foundation of education*, Macmillan Publishing Co. Inc., New York.
- Henderson, S. van P., *Introduction to Philosophy of Education*, The University of Chicago Press, Chicago.
- Kneller, G., (Ed.), (1971), *Foundations of Education*, John Wiley and Sons, New York.
- Noor, M., (Ed.), (1987), *Filsafat dan Teori Pendidikan: Jilid I Filsafat Pendidikan*, Sub Koordinator Mata kuliah filsafat dan Teori Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP Bandung.
- Oesman O., Alfian, (Penyunting) (1992), *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP 7 Pusat.
- Power, Edward, J., (1982), *Philosophy of education: Studies in Philosophies, Schooling, and Educational Policies*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
- Syaripudin, T. dan Kurniasih, (2008), *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Bandung, Percikan Ilmu.
- Syam, M. N., (1984), *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Suparno, P., (1997), *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Titus, H.H., *Living Issues in Philosophy*, American Book Company, New York.
- Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 Tentang “Sistem Pendidikan Nasional”.

Hand Out Perkuliahan

Nama Mata Kuliah	: Landasan Pendidikan
Semester/Program	: II/S1 PGSD
Pertemuan ke	: 7
Pokok Bahasan	: Landasan filosofis pendidikan konstruktivisme dan pendidikan Nasional (Pancasila)

A. Landasan Filosofis pendidikan konstruktivisme

Konstruktivisme : Konstruktivisme berkembang dalam rangka mengatasi proses pendidikan yang pada umumnya dilakukan melalui transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Parakonstruktivis ingin mengubah agar siswa belajar melalui suatu proses dengan cara-cara yang bermakna memperkaya dan memungkinkan siswa menginterpretasikan alam semesta dengan pengertian ilmiah. Konstruktivisme didukung oleh empirisme dan pragmatisme. Adanya yang berpendapat bahwa Konstruktivisme mengandung bahaya yang mengarah ke empirisme ke relativisme.

Otologi. Konstruktivisme tidak mengetahui apa sesungguhnya substansi realitas ini, mereka tidak tertarik atas persoalan tersebut. Bagi mereka, realitas tidak pernah ada secara terpisah dari pengamat (subjek), yang diketahui bukan realitas “di sana” yang berdiri sendiri, melainkan kenyataan sejauh dipahami dikonstruksi oleh subjek pengamat. Karena itu, realitas bersifat plural.

Manusia: manusia dituntut aktif membangun sendiri pengetahuannya. Eksistensi dan proses menjadi manusia berada dalam konteks interaksi dengan lingkungannya. Epistemologi: sumber pengetahuan adalah dunia luar, tetapi dikonstruksi dari dalam diri individu. Kriteria kebenaran pengetahuan diletakkan pada viabilitas, karena itu pengetahuan bersifat subjektif, tidak dapat ditransfer begitu saja, pengetahuan belum final atau masih berkembang, dan bersifat relatif. Sejalan dengan ini bagi mereka juga bersifat relatif.

Pendidikan. Konstruktivisme memandang pendidikan (mengajar) bukan sebagai kegiatan menyampaikan pengetahuan, melainkan membantu siswa berpikir secara bendar dengan membiarkannya berpikir sendiri. Mengajar adalah berpartisipasi dengan pelajar dalam mengkonstruksi pengetahuan, membuat makna, mempertanyakan kejelasan, bersikap kritis, dan mengembangkan justifikasi. Tujuan pendidikannya lebih mengutamakan perkembangan konsep dan pengetahuan yang mendalam sebagai hasil konstruksi aktif siswa. Kurikulumnya merupakan program aktivitas di mana pengetahuan dan keterampilan bisa dikonstruksi. Kurikulum bukan bahan yang sudah jadi, melainkan lebih merupakan permasalahan yang harus dipecahkan siswa. Metode: mempertimbangkan multimetode untuk dipilih, sebab siswa mempunyai caranya sendiri untuk mengerti. Selain itu, pengetahuan dibangun secara individual dan sosial maka belajar kelompok dapat dikembangkan. Peranan guru-siswa: Peran guru adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam membantu siswa belajar. Guru dan siswa berperan sebagai mitra, siswa harus bertanggung jawab atas hasil belajarnya.

B. Landasan Filosofis pendidikan Nasional (Pancasila)

Konsep filsafat umum : realitas adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan adalah sumber pertama dari segala yang ada dan tujuan akhir segala yang ada. Realitas fisik dan atau non fisik tampak dalam pluralitas fenomena alam semesta sebagai keseluruhan yang integral. Terdapat alam fana dan alam akhirat yang abadi di mana manusia akan dimintai pertanggung jawaban dan menerima imbalan atas pelaksanaan tugas hidupnya dari Tuhan YME. Di alam fana ini realitas tidak bersifat given (terberi) dan final, melainkan juga “mewujud” sebagaimana kita manusia dan semua anggota alam semesta berpartisipasi “mewujudkannya”. Manusia adalah makhluk Tuhan YME (asas ketuhanan YME); manusia adalah kesatuan badani-rohani, eksistensi dan kehidupannya multi dimensi tetapi ia adalah kesatuan utuh yang integral (asas mono dualis dan mono pluralis tetapi integral). Selain itu, pancasila juga memandang manusia sesuai asas nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Pengetahuan diperoleh melalui keimanan/kepercayaan, berpikir, pengalaman empiris, penghayatan, dan intuisi. Kebenaran pengetahuan ada yang bersifat mutlak, ada pula yang bersifat relatif. Sumber pertama segala nilai hakikatnya adalah Tuhan YME, karena manusia adalah makhluk Tuhan, pribadi/individual dan sekaligus insan sosial, maka hakikat nilai diturunkan dari Tuhan YME, masyarakat dan individu.

Pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Isi/kurikulum hendaknya memperhatikan : a) peningkatan iman dan takwa; b) peningkatan akhlak mulia; c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; e) tuntutan pengembangan daerah dan nasional; f) tuntutan dunia kerja; g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h) agama; i) dinamika perkembangan global; j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Praktek pendidikan hendaknya diselenggarakan dengan menggunakan multi metode dengan tetap mengutamakan prinsip cara belajar siswa aktif. Perananan pendidik dan peserta didik tersurat dan tersirat dalam semboyan “ing ngarso sung tulodo”, “ing madya mangun karso”, “tut wuri handayani”, adapu orientasi pendidikannya meliputi fungsi konservasi dan kreasi.

Daftar Pustaka

- Amien, A. M., (2005), *Pendidikan dari Perspektif Sains Baru: Belajar Merajut realitas*, Lembaga Penerbitan Unhas.
- Callahan J. F., Clark, L.H., (1983), *Foundation of education*, Macmillan Publishing Co. Inc., New York.
- Henderson, S. van P., *Introduction to Philosophy of Education*, The University of Chicago Press, Chicago.
- Kneller, G., (Ed.), (1971), *Foundations of Education*, John Wiley and Sons, New York.
- Noor, M., (Ed.), (1987), *Filsafat dan Teori Pendidikan: Jilid I Filsafat Pendidikan*, Sub Koordinator Mata kuliah filsafat dan Teori Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP Bandung.
- Oesman O., Alfian, (Penyunting) (1992), *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP 7 Pusat.

- Power, Edward, J., (1982), *Philosophy of education: Studies in Philosophies, Schooling, and Educational Policies*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Clifs, New Jersey.
- Syaripudin, T. dan Kurniasih, (2008), *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Bandung, Percikan Ilmu.
- Syam, M. N., (1984), *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Suparno, P., (1997), *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Titus, H.H., *Living Issues in Philosophy*, American Book Company, New York.
- Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 Tentang “*Sistem Pendidikan Nasional*”.

Hand Out Perkuliahan

Nama Mata Kuliah	: Landasan Pendidikan
Semester/Program	: II/S1 PGSD
Pertemuan ke	: 9
Pokok Bahasan	: Landasan psikologis pendidikan tentang pendidikan anak dan teori belajar, makna belajar dalam kependidikan.

A. Pendidikan Anak

Psikologi sebagai landasan kegiatan pendidikan, pernyataan ini mengimplikasikan bahwa seorang guru dalam belajar perlu menangani anak secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan aspek fisik dan psikis anak dalam rangka menciptakan kegiatan belajar yang bermakna. Guru memahami keberadaan setiap individu anak sebagai wujud yang utuh dan menangani setiap permasalahan yang muncul dari diri anak dalam peristiwa belajar melalui pendekatan psikologis. Seorang guru dalam bergaul dengan anak penting sekali untuk memahami perkembangan dan prinsip-prinsip perkembangan serta tugas-tugas perkembangan anak, hal ini sangat membantu guru dalam memahami perbedaan-perbedaan yang dimiliki setiap anak sehingga mempermudah kegiatan belajar berjalan dengan lancar.

Perkembangan anak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu berdasarkan aliran Asosiasi, aliran Gestalt dan Neo-Gestalt serta aliran sosiologis.

Ada empat pandangan para ahli yang mengemukakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, yaitu Pandangan Naturalisme, pandangan Empirisme atau Environmentalisme dan pandangan konvergensi atau Interaksionisme.

Seorang pendidik atau guru dalam menjalankan tugasnya perlu memahami fase-fase perkembangan anak. Setiap fase perkembangan perlu dipahami dan dijadikan landasan dalam mendidik sehingga mampu memberikan layanan yang memadai yang dibutuhkan oleh anak. Fase perkembangan tersebut yaitu Tingkat Sensori Motorik, Tingkat Praoperasional, Tingkat Operasional Konkret dan Tingkat Operasional Formal. Selain fase-fase perkembangan, perlu juga memahami tugas-tugas perkembangan anak pada setiap fase atau periode-periode tertentu.

B. Teori Belajar dan Makna Belajar Dalam Kependidikan.

Belajar sangat penting bagi kehidupan seorang manusia, mengapa anak manusia membutuhkan waktu yang lama untuk belajar melalui proses yang panjang, sehingga menjadi manusia dewasa. Manusia selalu dan senantiasa belajar bila manapun dan dimanapun dia berada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seorang pendidik perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan belajar, yang mana ciri dari hasil belajar adalah adanya perubahan perilaku pada diri individu yang belajar. Selanjutnya perlu juga memahami tentang teori-teori belajar, ada tiga teori belajar menurut pandangan beberapa ahli yaitu Teori Belajar Ilmu Jiwa Daya, menurut pandangan ini otak manusia terdiri dari bagian-bagian atau daya-daya, dan daya-daya tersebut mempunyai fungsi tertentu dan harus dilatih agar dapat berfungsi dengan baik. Teori Belajar Asosiasi yang

beranggapan bahwa manusia memiliki kesan-kesan, tanggapan atau response, maka menurut teori ini mendidik dan mengajar harus diusahakan dengan memberi stimulus-stimulus. Selanjutnya Teori Belajar Organisme Gestalt yang memandang bahwa keseluruhan merupakan hal yang utama. Anak dipandang sebagai suatu keseluruhan organisme yang dinamis dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya untuk mencapai tujuan tertentu.

Ada tiga makna belajar menurut pandangan para ahli yaitu Pandangan Psikologi Kognitif beranggapan bahwa belajar merupakan proses mental dimana informasi-informasi yang diperoleh anak diproses melalui pola pikir. Pandangan Behaviorisme beranggapan bahwa belajar ditandai dengan adanya perubahan perilaku yang dapat diamati dan lebih ditentukan oleh lingkungan. Kegiatan belajar terjadi karena adanya hubungan stimulus dan respons. Selanjutnya pandangan Humanisme beranggapan bahwa belajar harus melibatkan intelektual dan emosi anak, anak dipandang sebagai keseluruhan organisme yang berbuat. Setelah mengkaji subjek didik yang belajar perlu pula mengkaji tentang guru yang mengajar dan model-model mengajar yang digunakan.

Daftar Pustaka

- AR. Henry Sitanggung. (1994). Kamus Psikologi. Bandung : CV. Armico
- A. Supratiknya. (1993). Psikologi Kepribadian 1 teori-teori Psikodinamik. Yogyakarta : Kanisius.
- D.E. Griffiths dalam F.D. Carver & T.J. Sergiovanni. (1969). Organization and Human Behavior. New York : Fawcett Publication Inc.
- Hall, Calvin & Lindzey. (1985). Introduction to Theories of Personality. New York: John Wiley & Sons.
- Kartini Kartono. (2005). Teori Kepribadian. Bandung: Madar Maju.
- M. Ngalim Purwanto. (1990). Psikologi Pendidikan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Odang Muchtar. (1985). Dasar-dasar Kependidikan. IKIP Bandung : Depdikbud.
- Redja Mudyahardjo. (1992). Dasar-dasar Kependidikan Modul 4. Jakarta : Depdikbud.
- S.L. Yelon & G.W. Weinstein. (1977). A Teacher's Word : Psychology in the Classroom. New York : Mc. Graw Hill Book Co
- S.Z. Arbi & Syahrums. (1993). Dasar-dasar kependidikan. Jakarta : Dirjen Dikti-Depdikbud.
- Sunaryo Kartadinata & Nyoman Dantes. (1997). Landasan-landasan Pendidikan Sekolah Dasar. Jakarta : Dirjen Dikti-Depdikbud.

Hand Out Perkuliahan

Nama Mata Kuliah	: Landasan Pendidikan
Semester/Program	: II/S1 PGSD
Pertemuan ke	: 10
Pokok Bahasan	: Landasan psikologis pendidikan tentang teori kepribadian.

Meskipun adanya perbedaan-perbedaan dalam cara mengemukakan atau merumuskan personality atau kepribadian, namun didalamnya kita dapat melihat adanya persamaan-persamaan atau persesuaian pendapat satu sama lain. Diantaranya bahwa kepribadian atau personality itu dinamis, tidak statis atau tetap saja tanpa perubahan. Ia menunjukkan tingkah laku yang terintegrasi dan merupakan interaksi antara kesanggupan-kesanggupan bawaan yang ada pada individu dengan lingkungannya. Ia bersifat psikofisik, yang berarti baik faktor jasmani maupun rohaniah individu itu bersama-sama memegang peranan dalam kepribadian. Ia juga bersifat unik, artinya kepribadian seseorang sifatnya khas, mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dari individu yang lain. Setiap orang mempunyai kepribadiannya sendiri yang khas, yang tidak identik dengan orang lain. Jadi ada ciri-ciri atau sifat-sifat individual pada aspek-aspek psikisnya, yang bisa membedakan dirinya dengan orang lain.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh C.G. Jung, bahwa persona merupakan kedok atau topeng bagi manusia yang berfungsi sebagai benteng pelindung. Pada hakekatnya manusia itu hampir tidak pernah bisa bertingkah laku wajar atau sebenarnya. Manusia sulit untuk dapat memahami arti dan hakekat dirinya sendiri. Oleh karena itu, untuk memahami atau mengenal diri kita sendiri, kita berjuang agar dengan pengenalan diri, kita benar-benar dapat memahami dan dapat mengembangkan diri sendiri.

Sebagai pendidik perlu memahami beberapa aspek kepribadian baik fisik maupun psikis, dalam rangka pembentukan pribadi anak-aak didik. Aspek-aspek tersebut adalah sifat-sifat kepribadian, intelegensi, pernyataan diri, dan secara menerima kesan-kesan, kesehatan, sikap terhadap orang lain, pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, penguasaan dan kuat lemahnya perasaan, peranan, dan *the self*.

Seorang pendidik dalam membimbing pembentukan kepribadian anak, perlu juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian anak yaitu : faktor biologis, sosial dan kebudayaan. Terdapat juga ciri-ciri khusus teori kepribadian yaitu riset, menggunakan data klinis dan memprioritaskan masalah-masalah kehidupan sehari-hari klien.

Dalam teori kepribadian memiliki keunggulan yaitu sifat kajian lebih spesifik yaitu menyangkut aspek-aspek kepribadian dan memberi kontribusi pada teori psikologi lainnya. Selain keunggulan terdapat pada kelemahan yaitu sulit dibedakan antara teori dan pengalaman sehingga perlu dikaji ulang.

Daftar Pustaka

AR. Henry Sitanggang. (1994). Kamus Psikologi. Bandung : CV. Armico

- A. Supratiknya. (1993). Psikologi Kepribadian 1 teori-teori Psikodinamik. Yogyakarta : Kanisius.
- D.E. Griffiths dalam F.D. Carver & T.J. Sergiovanni. (1969). Organization and Human Behavior. New York : Fawcett Publication Inc.
- Hall, Calvin & Lindzey. (1985). Introduction to Theories of Personality. New York: John Wiley & Sons.
- Kartini Kartono. (2005). Teori Kepribadian. Bandung: Madar Maju.
- M. Ngalim Purwanto. (1990). Psikologi Pendidikan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Odang Muchtar. (1985). Dasar-dasar Kependidikan. IKIP Bandung : Depdikbud.
- Redja Mudyahardjo. (1992). Dasar-dasar Kependidikan Modul 4. Jakarta : Depdikbud.
- S.L. Yelon & G.W. Weinstein. (1977). A Teacher's Word : Psychology in the Classroom. New York : Mc. Graw Hill Book Co
- S.Z. Arbi & Syahrums. (1993). Dasar-dasar kependidikan. Jakarta : Dirjen Dikti-Depdikbud.
- Sunaryo Kartadinata & Nyoman Dantes. (1997). Landasan-landasan Pendidikan Sekolah Dasar. Jakarta : Dirjen Dikti-Depdikbud.

Hand Out Perkuliahan

Nama Mata Kuliah	: Landasan Pendidikan
Semester/Program	: II/S1 PGSD
Pertemuan ke	: 11
Pokok Bahasan	: Landasan biologis pendidikan dan pendekatan sosial budaya Indonesia.

A. Landasan Biologis Pendidikan

Biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup serta proses kehidupan. Dari faktor biologi, manusia dan hewan memiliki persamaan karakteristik, namun ada perbedaan yang prinsipil yaitu manusia memiliki potensi superior yang membedakannya dengan makhluk lain.

Potensi superior tersebut adalah kemampuan mental, kecerdasan, akal budi atau daya pikir yang paling sempurna yang kesemuanya berada dalam otak. Selama tahun pertama kehidupan bayi, pertumbuhan otaknya pesat sehingga mencapai dua kali lipat. Pada usia 6 atau 7 tahun, otak anak hampir mencapai proporsi orang dewasa berat otaknya bertambah lebih dari tiga kali lipat dibanding berat ketika lahir. Sedangkan simpanse otaknya tumbuh hanya sekitar sepertiga dibanding saat dia lahir

Menurut Mc. Crone bahwa bertambahnya jumlah sel-sel otak pada manusia karena disebabkan adanya penundaan proses pelapisan protein lemak (*myelin sheath*), yang membungkus dan mengisolasi semua jaringan syaraf. *Myelin sheath* adalah protein lemak yang membungkus kawat tembaga. Penundaan proses myelinisasi membuat anak manusia fleksibel dalam belajar melihat, merasa, mendengar, berpikir. Pada anak manusia penundaan proses myelinisasi sangat lama dibandingkan dengan hewan.

Terdapat tiga arti biologi bagi pendidikan menurut Home yaitu : 1) Bertambahnya ukuran otak. 2) Panjangnya periode anak manusia dibandingkan dengan hewan yang lebih rendah dan 3) otak sebagai alat berfikir. Yang dapat dilakukan pendidikan untuk otak adalah dapat mengembangkan dan memperkuat sistem syaraf yang tidur dan melalui pembiasaan dapat membuat otak siap untuk pemikiran dan pembuatan baru.

Proses perkembangan yang dilalui anak tidak terjadi secara otomatis misalnya fungsi-fungsi fisiologis yang dimiliki anak berkembang secara bertahap sesuai dengan fase-fase perkembangannya melalui proses pendidikan yang dilaluinya.

Guru harus membatasi tuntutan-tuntutannya sesuai dengan kapasitas-kapasitas otak yang ada pada diri anak.

B. Landasan sosial budaya pendidikan

Program pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kekuatan-kekuatan sosial budaya, karena akan memberikan arah kepada pendidikan. Oleh sebab itu, kajian tentang dasar sosial budaya sangat penting bagi calon guru dan calon tenaga kependidikan lainnya.

Sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas sosial manusia. Aktivitas sosial manusia adalah kegiatan yang berkaitan dengan perilaku hubungan manusia dengan manusia dalam suatu kehidupan masyarakat tertentu.

Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik sebab kebudayaan dapat dilestarikan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi terdahulu kepada generasi sekarang dan generasi penerus dengan jalan pendidikan baik secara informal maupun secara formal. Sebaliknya bentuk, ciri-ciri dan pelaksanaan pendidikan itu ditentukan oleh kebudayaan masyarakat dimana proses pendidikan itu berlangsung.

Kebudayaan adalah merupakan hasil cipta dan karya manusia berupa norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan dan tingkah laku yang dipelajari dan dimiliki oleh semua anggota masyarakat tertentu. Kebudayaan terbentuk dipengaruhi oleh lokasi geografis dan iklim serta sumber-sumber alami setempat.

Pada masyarakat primitif, transmisi kebudayaan dilakukan secara informal, sedangkan pada masyarakat yang telah maju transmisi kebudayaan dilakukan secara informal dan formal. Peminjaman kebudayaan secara formal ini melalui lembaga-lembaga sosial seperti sekolah dan lain-lain.

Pada masyarakat yang sudah maju sekolah sebagai lembaga sosial mempunyai peranan yang sangat penting sebab pendidikan tidak hanya berfungsi untuk transmisi kebudayaan kepada generasi penerus, tetapi pendidikan juga berfungsi untuk mentransformasikan kebudayaan agar sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Sekolah berfungsi sebagai lembaga yang mempertahankan dan menjaga atau memelihara nilai-nilai budaya agar murid harus mengikuti. Sekolah berusaha melestarikan nilai-nilai budaya daerah tempat sekolah tersebut berlokasi. Nilai-nilai yang masih banyak dipertahankan misalnya penggunaan bahasa daerah, kesenian dan budi pekerti.

Antara kemampuan sekolah dengan kebutuhan masyarakat selalu terjadi kesenjangan karena sekolah belum dapat memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat. Maka sudah seharusnya kurikulum selalu diusahakan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Diselenggarakan usaha penyempurnaan kurikulum, peningkatan kualitas profesional guru, kelengkapan kebutuhan sara dan prasarana sekolah dan sekolah selalu berusaha untuk memberikan bekal kepada siswa untuk dapat mengembangkan kreativitas dan belajar secara mandiri.

Keragaman budaya yang melatarbelakangi masing-masing anak didik menuntut guru agar memiliki wawasan yang luas terhadap keadaan sosial budaya yang ada pada lingkungan guru mengajar.

Tiga faktor utama sebagai penyebab dari perubahan-perubahan sosial budaya yaitu :

- (1) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (2) Kependudukan
- (3) Lingkungan hidup

Dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan berbagai tantangan baru bagi lembaga pendidikan.

Daftar Pustaka

- A.R. Henry Sitanggang. (1994). Kamus Psikologi. Bandung : CV. Amico
- James H. Otto & A. Towle. (1997). Modern Biology. New York : Holt, Rinehart and Wiston Publishing.
- John J. Macionis. (1992). Society The Basics. New Jersey : Prentice Hall Inc.
- Maitland Edey & D.C. Johnson. (1993). Physical Antropogy. Connecticut : The Dushkin Publishing Group Inc.
- Posman Simanjuntak. (2003). Berkenalan dengan Antropology. Jakarta : Erlangga.
- Redja Mudyaharjo. (1992). Dasar-Dasar Kependidikan bahan Belajar Mandiri 4. Jakarta : Depdikbud.
- S.Z. Arbi & Syahrums. (1993). Dasar-Dasar Kependidikan. Jakarta : Dirjen Dikti-Depdikbud.
- Sunaryo Kartadinata & Nyoman Dantes (1997). Landasan-Landasan Pendidikan Sekolah Dasar. Jakarta : Diejen Dikti-Depdikbud.
- Sikun Pribadi. (1997). Landasan Pendidikan. Bandung : Jurusan FFP-FIP IKIP.

Hand Out Perkuliahan

Nama Mata Kuliah	: Landasan Pendidikan
Semester/Program	: II/S1 PGSD
Pertemuan ke	: 12
Pokok Bahasan	: Landasan Historis Pendidikan Indonesia pada zaman purba hingga zaman pemerintahan kolonial Belanda dan pendidikan yang diselenggarakan kaum pergerakan kebangsaan (Nasional) dan pendidikan pada zaman militerisme Jepang.

A. Pendidikan pada zaman purba hingga zaman pemerintahan Kolonial Belanda

Zaman purba. Kebudayaan pada zaman ini dikenal sebagai paleolitik dan neolitik. Masyarakat tidak memiliki stratifikasi sosial yang tegas (egaliter), adapun kepercayaan yang dianut adalah animisme dan dinamisme. Implikasinya, pendidikan bertujuan agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, dan taat terhadap adat dan nilai-nilai religi. Saat ini pendidikan berlangsung di dalam keluarga dan kehidupan masyarakat secara alamiah (belum berlangsung secara formal).

Zaman Kerajaan Hindu-Budha. Kedatangan saudagar-saudagar dari India telah mengakibatkan perubahan sosial budaya penduduk pribumi. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai kerajaan dan feodalisme, tersebarnya agama Hindu dan Budha, munculnya stratifikasi sosial berdasarkan kasta, dan dimulainya zaman sejarah. Implikasinya, pendidikan pada zaman ini selain diselenggarakan di dalam keluarga dan masyarakat juga telah berlangsung di perguruan atau pesantren. Pendidikan bertujuan agar peserta didik menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat, membela diri, dan membela negara. Kurikulum pendidikannya meliputi agama, bahasa Sansekerta termasuk membaca dan menulis (huruf Palawa), kesusasteraan, keterampilan memahat atau membuat candi, dan bela diri (ilmu berperang). Khususnya zaman Hindu pendidikan bersifat aristokratis. Adapun metode pendidikannya adalah sistem guru kula. Pada zaman Kerajaan Budha sudah berdiri "Perguruan Tinggi Budha" yang mana murid-muridnya berdatangan dari berbagai negara tetangga. Pengelolaan pendidikan bersifat otonom dimana pemerintah tidak ikut campur dalam mengelola sistem pendidikan.

Zaman Kerajaan Islam. Kedatangan para saudagar beragama Islam telah mengakibatkan perubahan di dalam masyarakat pribumi. Antara lain tersebarnya agama Islam dan kebudayaan yang bercorak Islami. Pemerintahan tetap berbentuk kerajaan, namun bagi kalangan muslim stratifikasi social sebagaimana berlaku pada zaman sebelumnya mulai ditinggalkan. Implikasinya, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT agar selamat dunia akhirat melalui pelaksanaan iman, ilmu dan amal. Selain di dalam keluarga pendidikan berlangsung juga di langgar-langgar, mesjid, dan pesantren. Pendidikan bersifat demokratis; seperti pada zaman-zaman sebelumnya pemerintah tidak ikut campur dalam

pengelolaan pendidikan (otonom). Kurikulumnya meliputi tauhid (pendidikan keimanan terhadap Allah S.W.T.), Al-Qur'an, hadist, fikih, bahasa Arab termasuk membaca dan menulis huruf Arab. Metode pendidikan dilakukan melalui tabligh (wetonan) dan sorogan (cara-cara belajar individual), selain itu digunakan pula media dan ceritera-ceritera yang digunakan pada zaman Hindu-Budha hanya saja isinya diganti dengan ajaran yang Islami. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang muncul zaman kerajaan Hindu-Budha diselenggarakan pula pada zaman kerajaan Islam dan bahkan sampai dewasa ini.

Zaman portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang, tetapi selain itu mereka pun (para missionaris) bertujuan menyebarkan agama Katholik. Implikasinya, pendidikan zaman ini utamanya dimaksudkan demi penyebaran agama Katholik. Tahun 1536 didirikan sekolah (Seminarie) di Ternate, selain itu didirikan pula di Solor. Kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama Katolik, ditambah pelajaran membaca, menulis dan berhitung. Pendidikan diberikan bagi anak-anak masyarakat terkemuka.

Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Pada awalnya (1596) bangsa Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang, mereka mendirikan VOC (1602). Selain berusaha menguasai daerah untuk berdagang, juga untuk menyebarkan agama Protestan. Sejak tahun 1800-1942 negeri kita menjadi jajahan Pemerintah Kolonial Belanda. Karakteristik kondisi sosial budaya pada zaman ini antara lain: (1) berlangsungnya penjajahan, kolonialisme; (2) dalam bidang ekonomi berlangsung monopoli perdagangan hasil pertanian yang dibutuhkan dan laku di pasar dunia; (3) terdapat stratifikasi sosial berdasarkan ras atau suku bangsa.

Bangsa Indonesia terus berjuang melawan penjajahan Belanda, perlawanan dan pemberontakan dilakukan oleh berbagai kelompok bangsa kita di berbagai daerah di tanah air. Penjajahan yang telah berlangsung lama benar-benar telah mengungkung kemajuan bangsa Indonesia, dan mengakibatkan kemelaratan serta kebodohan. Dengan semakin sadarnya bangsa Indonesia akan makna nasionalisme dan kemerdekaan, pada awal abad ke-20 (sejak kebangkitan nasional tahun 1908) lahirlah berbagai pergerakan. Pergerakan nasional berlangsung dalam jalur politik maupun pendidikan.

Implikasi dari kondisi di atas, pada zaman kolonial Belanda secara umum dapat dibedakan dua garis penyelenggaraan pendidikan, yaitu: pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan pendidikan yang dilaksanakan oleh kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan demi mencapai kemerdekaan dan sebagai rintisan pendidikan nasional. Ciri-ciri pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonialisme Belanda yaitu: (1) Tujuan pendidikannya adalah untuk menghasilkan tenaga kerja murah dan demi mendukung kelanggengan penjajahan. (2) adanya dualisme pendidikan, (3) sistem konkordansi, (4) sentralisasi pengelolaan pendidikan, (5) menghambat gerakan nasional.

B. Pendidikan yang diselenggarakan kaum pergerakan kebangsaan (pergerakan nasional) dan pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang

Pendidikan oleh Kaum Pergerakan Nasional. Faktor intern yang menimbulkan pergerakan kebangsaan (pergerakan nasional) antara lain adalah: 1) Penderitaan dan berbagai kondisi yang merugikan bangsa Indonesia akibat kebijakan pemerintah kolonial Belanda telah menimbulkan rasa senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang dijajah sehingga muncul rasa kebangsaan/nasionalisme. 2) Kebesaran masa lampau bangsa kita juga memperkuat rasa harga diri sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. 3) Kaum terpelajar di kalangan bangsa kita terdorong untuk berperan menjadi motor pergerakan. 4) Bahasa melayu yang merupakan bahasa kesatuan makin menyadarkan bahwa bangsa Indonesia adalah satu bangsa. 5) Karena mayoritas bangsa Indonesia memeluk agama Islam, maka timbul persepsi bahwa Belanda adalah Kafir.

Sejak Kebangkitan Nasional (1908) sifat perjuangan rakyat Indonesia dilakukan melalui berbagai partai dan organisasi, baik dalam jalur politik, ekonomi, sosial-budaya, dan khususnya melalui jalur pendidikan. Sifat perjuangan bangsa kita saat itu tidak lagi hanya menitik beratkan pendidikan pada perjuangan fisik. Mengingat ciri-ciri penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda yang tidak memungkinkan bangsa Indonesia untuk menjadi cerdas, bebas, bersatu, dan merdeka, maka kaum pergerakan memasukan pendidikan ke dalam program perjuangannya. Hampir setiap organisasi pergerakan nasional mencantumkan dan melaksanakan pendidikan dalam anggaran dasar dan/atau dalam program kerjanya.

Karakteristik pendidikan kaum pergerakan adalah: (1) bersifat nasionalistik dan sangat anti kolonialis, (2) berdiri sendiri atau percaya kepada kemampuan sendiri, dan (3) pengakuan kepada eksistensi perguruan swasta sebagai perwujudan harga diri yang tinggi dan kebhinekaan masyarakat Indonesia serta pentingnya pengembangan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Pendidikan Zaman Pendudukan Militerisme Jepang. Sesuai kondisi politik saat ini, tujuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Pendudukan Jepang diarahkan demi kepentingan memenangkan Perang Asia Timur Raya bagi Jepang. Karakteristik pendidikannya adalah: 1) hilangnya sistem dualisme pendidikan, 2) kesempatan untuk sekolah terbuka bagi setiap lapisan masyarakat, 3) susunan jenjang sekolah menjadi SR 6 Th., SM 3 Th., SMT 3 Th., dan PT., 4) hilangnya sistem konkordansi 5) Bahasa Indonesia untuk pertama kalinya dijadikan bahasa pengantar, sedangkan bahasa Belanda dilarang sebagai bahasa pengantar di sekolah.

Daftar Pustaka

- Ibrahim, Thalib (Penyadur), (1978), Pendidikan Mohd. Sjafei INS Kayu Tanam, Mahabudi, Jakarta.
- Djumhur, I dan Danasuparta, (1976), Sejarah Pendidikan, CV. Ilmu, Bandung.
- Majelis Luhur Persatuan Taman siswa, (1977), Karya Ki Hadjar Dewantara, Bagian Pertama: Pendidikan, Majelis Luhur Taman Siswa, Yogyakarta.
- Muchtar, O., (1976), Pendidikan Nasional Indonesia, Pengertian dan sejarah Perkembangan, Balai Penelitian Pendidikan IKIP Bandung.
- Poerbakawatja, S., (1970), Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka, Gunung Agung, Jakarta.

- Soejono, Ag., (1979), Aliran-Aliran Baru dalam Pendidikan; Bagian ke-2, CV. Ilmu, Bandung.
- Suhendi, Idit, (1997), Dasar-Dasar Historis dan Sosiologis Pendidikan, dalam Dasar-Dasar Kependidikan, IKIP Bandung.
- Tilaar, HAR., (1995), 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995, Suatu Analisis Kebijakan, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Tirtarahardja, U. dan La Sula (1995), Pengantar Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta.

Hand Out Perkuliahan

Nama Mata Kuliah	: Landasan Pendidikan
Semester/Program	: II/S1 PGSD
Pertemuan ke	: 13
Pokok Bahasan	: Landasan Historis Pendidikan Indonesia periode tahun 1945-1946 dan masa pembangunan jangka panjang (PJP) ke 1 : 1969-1993

A. Periode 1945-1969

Pada tgl. 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. Sejak saat itu jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Sekalipun pada tahun 1949 terjadi perubahan dasar negara yaitu dengan UUD RIS, tetapi pendidikan nasional tetap dilaksanakan sesuai amanat UUD 1945. Sejak tahun 1950 bangsa Indonesia telah mempunyai UU RI No. 4 Tahun 1950 tentang “Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah” yuncto UU RI No. 12 Tahun 1954. Di dalam Pasal 3 UU ini termaktub bahwa “Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”. Adapun Pasal 4 menyatakan: “Pendidikan dan pengajaran berdasar asas-asas yang termaktub dalam “Panca Sila” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia”.

Pada Tahun 1950-1960 telah dirancang dan dilaksanakan wajib belajar SD, untuk mengatasi kekurangan guru didirikan Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar kepada Kewajiban Belajar (KPKPKB). KPKPKB selanjutnya ditingkatkan menjadi SGB dan SGA. Adapun untuk guru sekolah menengah didirikan PGSLP dan APD. Tahun 1954 didirikan PTPG yang diubah menjadi FKIP dan akhirnya menjadi IKIP. Selain LPTK, sejak tahun 1949-1961 pemerintah juga telah mendirikan beberapa perguruan tinggi (universitas) dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1961 tentang “Perguruan Tinggi”.

Pada era Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama (1961-1969) sekalipun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan bahwa Bangsa dan Negara Kesatuan RI kembali ke UUD 1945, tetapi karena dominasi politik tertentu maka dasar atau asas pendidikan nasional diubah menjadi Pancasila dan Manipol USDEK. Pada era ini tujuan pendidikannya adalah untuk melahirkan warga-warga negara sosialis Indonesia yang susila, bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan berjiwa Pancasila. Tugas pendidikan adalah menghimpun kekuatan progresif revolusioner berporoskan Nasakom. Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka ditetapkan apa yang disebut Sapta Usaha Tama, Pantja Wardhana, dan Hari Krida. Berbagai program pembangunan pada era ini akhirnya rontok akibat terjadinya Pemberontakan G-30 S/PKI pada tahun 1965 dan lahirlah era baru yang dikenal dengan Orde Baru.

B. Era PJP I (1969-1993)

Sejak zaman Orde Baru dan dalam era PJP I dasar pendidikan dikembalikan kepada Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan nasional ditujukan untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan Pembukaan UUD 1945 dan Isi UUD 1945, yang kemudian di dalam UU No. 2 Tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Sejak awal Pelita I PJP I telah dilakukan identifikasi masalah-masalah pendidikan nasional, selanjutnya pembangunan pendidikan dilakukan secara bersinambungan pada setiap Pelita. Selama PJP I telah dilakukan tiga kali pembaharuan kurikulum sekolah, yaitu kurikulum 1968, 1975 dan 1984; penambahan dan perbaikan sarana maupun prasarana pendidikan; Inpres SD; Upaya peningkatan jumlah dan mutu tenaga kependidikan; serta dilakukan berbagai inovasi pendidikan lainnya demi meningkatkan partisipasi, relevansi, efisiensi, efektivitas dan mutu pendidikan nasional. Untuk itu, pembangunan pendidikan dibiayai baik dengan menggunakan dana rupiah maupun dana hasil kerjasama luar negeri. Memang banyak hasil pembangunan pendidikan selama PJP I yang telah di raih, namun demikian permasalahan pendidikan masih tetap belum terpecahkan secara keseluruhan dan masih harus terus diupayakan melalui pembangunan pendidikan pada PJP selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Ibrahim, Thalib (Penyadur), (1978), Pendidikan Mohd. Sjafei INS Kayu Tanam, Mahabudi, Jakarta.
- Djumhur, I dan Danasuparta, (1976), Sejarah Pendidikan, CV. Ilmu, Bandung.
- Majelis Luhur Persatuan Taman siswa, (1977), Karya Ki Hadjar Dewantara, Bagian Pertama: Pendidikan, Majelis Luhur Taman Siswa, Yogyakarta.
- Muchtar, O., (1976), Pendidikan Nasional Indonesia, Pengertian dan sejarah Perkembangan, Balai Penelitian Pendidikan IKIP Bandung.
- Poerbakawatja, S., (1970), Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka, Gunung Agung, Jakarta.
- Soejono, Ag., (1979), Aliran-Aliran Baru dalam Pendidikan; Bagian ke-2, CV. Ilmu, Bandung.
- Suhendi, Idit, (1997), Dasar-Dasar Historis dan Sosiologis Pendidikan, dalam Dasar-Dasar Kependidikan, IKIP Bandung.
- Tilaar, HAR., (1995), 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995, Suatu Analisis Kebijakan, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Tirtarahardja, U. dan La Sula (1995), Pengantar Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta.

Hand Out Perkuliahan

Nama Mata Kuliah	: Landasan Pendidikan
Semester/Program	: II/S1 PGSD
Pertemuan ke	: 14
Pokok Bahasan	: Landasan Yuridis Sistem Pendidikan Nasional

UUD 1945 dan UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dua bentuk landasan yuridis pendidikan nasional. Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan, mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan mewajibkan pemerintah untuk membiayainya. Pasal 31 UUD 1945 juga mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, serta memajukan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Landasan yuridis pendidikan yang bersumber dari UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional - yang dikaji dalam kegiatan pembelajaran ini - antara lain meliputi: Pasal 1 Ketentuan Umum; Penjelasan mengenai visi, misi, dan strategi pendidikan nasional; Pasal 2 mengenai dasar pendidikan nasional; Pasal 3 mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional; Pasal 4 mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan; Pasal 5 s.d. Pasal 11 mengenai hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat dan pemerintah; Pasal 32 mengenai Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus; serta Pasal 34 mengenai wajib belajar.

Daftar Pustaka

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang “Standar Nasional Pendidikan”
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang “Sistem Pendidikan Nasional”.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang “Guru dan Dosen”.

Hand Out Perkuliahan

Nama Mata Kuliah	: Landasan Pendidikan
Semester/Program	: II/S1 PGSD
Pertemuan ke	: 15
Pokok Bahasan	: Landasan Yuridis Penyelenggaraan sistem pendidikan Nasional pada Jalur, Jenjang, dan Satuan Pendidikan

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 dalam sistem pendidikan nasional, terdapat tiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pada jalur pendidikan formal terdapat tiga jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Adapun jenis pendidikannya terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.

Dalam sistem pendidikan nasional diselenggarakan pula pendidikan anak usia dini, pendidikan keagamaan, pendidikan kedinasan, pendidikan jarak jauh, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus.

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan, dan/atau keterampilan tertentu.

Pendidik harus mempunyai kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai tugas, hak dan kewajiban tertentu.

Terdapat pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Sedangkan pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan.

Peran masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional,

provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan R I mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Daftar Pustaka

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang “Standar Nasional Pendidikan”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang “Sistem Pendidikan Nasional”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang “Guru dan Dosen”.